

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK WANITA TANI DI DESA KRAGUMAN,
KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN,
PROVINSI JAWA TENGAH**



Disusun Oleh:

EMILIA GORENSA EGOT

NIM: 16520043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2021



**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK WANITA TANIDI DESA KRAGUMAN,
KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN,
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Progam Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Agustus 2021

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. **Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**

Ketua Penguji / Pembimbing

Leslie Retno Angeningsih

2. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA**

Penguji Samping I

Nelly Tiurmida

3. **Utami Sulistiana, S.P.M.P**

Penguji Samping II

Utami Sulistiana



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



[Signature]
Drs. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emilia Gorensa Egot

Nim : 16520043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DI DESA KRAGUMAN KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan dengan benar.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

Penulis,



Emilia Gorensa Egot
16520043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji serta syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan Perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-Nya selama ini sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Dengan rasa tulus dan penuh kebanggaan, karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang senantiasa mendukung penyelesaian Skripsi ini dengan caranya masing-masing:

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Agustinus Egot dan Ibu Elisabeth Damus atas doa, penguatan, dorongan dan semangat yang tiada henti yang diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus *supports* yang sangat luar biasa selama pengerjaan Skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Bapa Defri Taloni dan Ibu Erni Fernandez yang selalu mendoakan saya.
4. Terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada suami saya tercinta Lorenthio Gratiano yang telah mendukung saya tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini dan juga Putra saya terkasih Avelario Mainarth Luciano yang menjadi penghibur bagi saya selama ini.
5. Terima kasih kepada Kakak-kakak saya Yuliana Nurhayati Egot, Arsenius Sumardi, Ella Asbiha Egot, kakak Budi Jalang, Kakak Yifi Nurdin, dan Kakak Yanto Purwanto yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
6. Terima kasih kepada adik-adik saya Lulang, Heri, Canoks, Veranda, Enjo, Arrs, Langit, Maristin, Ergin, Anwar dan Ayu yang tiada henti-hentinya mendukung saya selama penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman saya Willy, Olin, Cellin, Osdin, Eyen, Ann, Lius dan Fann Agung yang selalu menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu.”

(1 Petrus 5:7)

“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan,
tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.”

(Amsal 18:24)

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses, kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani.”

(Susi Pudjiasti)

“Langkah kecil menggapai keberhasilan adalah
mencintai apa yang sedang anda kerjakan ”

(Ensa Egot)

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan, berkat dan rahmat yang tidak berkesudahan sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani" ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan.

Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD"APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Sunaryo selaku Kepala Desa Kraguman tempat penulis melakukan penelitian.
8. Mbak Betta dan Mas Razzim selaku Perangkat Desa Kraguman yang selalu membantu penulis mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Anggota Kelompok Wanita Tani “Bina Melati” Desa Kraguman yang bersedia memberikan informasi dan selalu menyemangati penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharakan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, Agustus 2021

Penulis,

Emilia Gorensa Egot

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan seperti kaum perempuan sehingga mereka mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Kaum perempuan di desa seringkali mengalami kendala dan keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya. Keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, kurangnya akses untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, serta lemahnya organisasi perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya baik itu sumber daya ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pengorganisasian seperti Kelompok Wanita Tani yaitu organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian di desa. Pemberdayaan perempuan dapat berjalan apabila terdapat peran serta pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Kepala Desa Kraguman serta segala usahanya dalam memberikan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan bagi Kelompok Wanita Tani. Subyek penelitian ini berjumlah 10 informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Kelompok Wanita Tani, Bendahara Kelompok Wanita Tani, Pengurus Unit Sarana dan Prasarana Produksi Kelompok Wanita Tani, Anggota Kelompok Wanita Tani, dan Tokoh Masyarakat. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman dilakukan melalui pemberian pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Sejauh ini ada dua kendala yang dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman yaitu kesulitan untuk membagi waktu dan kesulitan untuk mendapatkan dana. Untuk mencari jalan keluar dari persoalannya, ada dua cara yang ditempuh oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati yaitu menggelar rapat rutin sekali sebulan dan menggelar konsultasi dengan Pemerintah Desa Kraguman. Sejauh ini produk yang dihasilkan oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati hanya dikonsumsi oleh para anggota kelompok dan belum didistribusikan kepada masyarakat Desa Kraguman secara umum karena produk yang dihasilkan masih sedikit.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Wanita Tani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia terutama angkatan kerja yang bermukim di pedesaan. Dengan kenyataan ini, maka pembangunan pertanian mesti menjadi fokus pemerintah Indonesia. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup petani, kesempatan kerja, dan berusaha, serta meningkatkan gizi dan ketahanan rumah tangga (Elizabeth, 2008).

Dalam rangka menunjang pembangunan pertanian, keterlibatan berbagai aktor menjadi sebuah keharusan. Hal ini perlu dilakukan karena pola pembangunan yang berkembang di desa saat ini adalah pola pembangunan partisipatif. Pola pembangunan partisipatif merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan pola pembangunan partisipatif, salah satu aktor yang mesti terlibat dalam pembangunan pertanian adalah kaum perempuan. Sebab perempuan memainkan peranan penting dalam upaya untuk memajukan sektor pertanian di negara ini. Salah satu peran perempuan dalam pembangunan pertanian adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan. Upaya ini bisa dilakukan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu program

yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan limbah rumah tangga, dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk industri skala kecil dan besar.

Mengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan pertanian, maka pemerintah berkomitmen penuh terhadap kaum perempuan. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dengan mengalokasikan APBD/APBN yang lebih besar terhadap kaum perempuan. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak perempuan yang terlibat di sektor pertanian (Syarif, 2018: 78).

Meskipun demikian, kaum perempuan di pedesaan seringkali mengalami kendala dan keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya di sektor pertanian. Keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, kurangnya akses untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, serta lemahnya organisasi tani terutama dalam menghadapi modernisasi pertanian. Situasi ini menempatkan mereka dalam situasi kurang berdaya.

Dalam situasi yang kurang berdaya seperti ini serta didukung oleh tingkat ekonomi yang rendah, mau tidak mau, perempuan harus terlibat dalam membantu perekonomian keluarganya. Hal ini kemudian membuat perempuan memiliki peran ganda dalam keluarga. Akibatnya, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mengurangi beban keluarganya. Seringkali perempuan mendapatkan pekerjaan yang cenderung kasar dan lebih menguras

fisik dan tenaga. Pada masyarakat pedesaan, pekerjaan yang paling banyak diperoleh perempuan misalnya, menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pedagang, dan buruh tani. Hanya sebagian kecil saja perempuan di pedesaan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara maupun karyawan kantor. Hal ini tentu tidak terlepas dari pendidikan perempuan yang seringkali terabaikan (Ardiani, 2020: 2). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pembangunan pertanian.

Salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan yaitu melalui pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan diasumsikan bahwa jika ingin meningkatkan posisi tawar perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah nasibnya sendiri. Artinya, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan tidak saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek (pelaku aktif), sebagai orang yang merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka (Pratama, 2013: 12).

Pemberdayaan digunakan sebagai model pendekatan pembangunan alternatif dengan memberikan otonomi kepada masyarakat. Melalui otonomi tersebut, akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang terkait dengan dirinya. Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Purnasari, 2014).

Pemberdayaan akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan

masa depannya. Pemberdayaan juga akan membuat perempuan dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya baik itu sumber daya ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dengan begitu, perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuannya dan konsep diri (Novian, 2010). Jadi, pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa ahli studi perempuan menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan posisi tawar perempuan adalah melalui pengorganisasian. Pengorganisasian dianggap sebagai langkah paling konkret untuk dapat memberdayakan perempuan itu secara lebih baik. Salah satu langkah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian adalah melalui pembentukan organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Mosher yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk memperlancar pembangunan pertanian adalah adanya kerjasama kelompok tani sehingga perlu adanya pengorganisasian wadah petani yang berupa kelompok tani (Mayanfa'uni, 2016: 3). Nuryanti dan Swastika mengatakan bahwa secara teoretis kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kepentingan bersama dalam usaha tani

(Wiranti, 2016). Dengan adanya kelompok tani, petani diharapkan bisa saling bertemu dan bermusyawarah secara bersama-sama untuk merencanakan suatu kegiatan.

Kelompok Wanita Tani merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk mengakomodasi kaum perempuan sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam memajukan sektor pertanian yang ada di desa. Selain itu, Kelompok Wanita Tani merupakan bentuk perkumpulan ibu-ibu untuk menampung aspirasi perempuan tani. Jadi, Kelompok Wanita Tani merupakan organisasi yang dibentuk atau wadah tempat berkumpulnya istri-istri petani dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan petani (Alam, 2019: 373).

Saat ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan sudah memiliki perkumpulan dalam bentuk Kelompok Wanita Tani. Hal ini menegaskan bahwa pengorganisasian terhadap perempuan tani merupakan hal yang penting dalam memajukan pertanian di desa. Dengan adanya Kelompok Wanita Tani dapat dikatakan bahwa kepedulian perempuan dalam berpartisipasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga sudah cukup peka. Namun, ironisnya, sejauh ini Kelompok Wanita Tani masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan usaha tani yang dijalani. Keterbatasan ini terjadi karena keterbatasan lahan, kurangnya dana, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Kelompok Wanita Tani perlu dibarengi oleh agenda pemberdayaan.

Pentingnya pemberdayaan bagi Kelompok Wanita Tani di desa setidaknya ditunjukkan melalui kedua penelitian berikut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Asriyanti Syarif pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usaha Tani Sayuran di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng*”. Dalam penelitian ini, Asriyanti Syarif menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng berkeja sebagai petani dan perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tani sayuran. Sebab Kecamatan Bisaapu merupakan wilayah yang potensial bagi tanaman sayuran dan tanaman buah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan, program, tingkat partisipasi serta dampak sosial dan ekonomi pemberdayaan perempuan dalam menghadapi modernisasi pertanian melalui Kelompok Wanita Tani.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Wanita Tani dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan rutin, demonstrasi pada kebun percobaan, penyuluhan dan pengolahan hasil dari sayuran yang melibatkan penyuluh sebagai pembimbing. Adapun program-program pemberdayaan perempuan berupa pemberian sarana produksi, peralatan, kebun percobaan, pengelolaan hasil pertanian, dan penyuluhan. Sementara itu, tingkat partisipasi perempuan dalam Kelompok Wanita Tani tergolong tinggi karena nilai manfaat yang diperoleh berupa pengetahuan dan keterampilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Wanita Tani mempunyai dampak secara sosial dan ekonomi. Dampak pemberdayaan secara sosial meliputi perubahan perilaku, peningkatan wawasan, peningkatan komunikasi dan kerjasama, peningkatan peran perempuan, dan perluasan sektor pekerjaan dari sektor domestik menjadi sektor domestik dan publik (sektor pertanian). Sedangkan dampak pemberdayaan secara ekonomi meliputi menciptakan lapangan pekerjaan di bidang pertanian, memberikan nilai tambah bagi produk pertanian dengan pemanfaatan teknologi pengolahan, dan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 7,03% (Syarif, 2018).

Kedua, penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad Mustanir, Hariyanti Hamid, dan Rifni Nikmat Syarifuddin. Penelitian ini berjudul “*Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif*”. Dalam penelitian tersebut, kelompok masyarakat desa yang dimaksud adalah Kelompok Wanita Tani Lestari.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Lestari dalam perencanaan melalui metode partisipatif adalah pendampingan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan membuat sebuah perencanaan partisipatif. Pemberdayaan pendampingan perencanaan partisipatif dilakukan untuk membantu permasalahan mitra dengan kegiatan-kegiatan dan metode seperti: (1) melakukan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya bekerjasama dalam berorganisasi dan pembagian kerja untuk menunjang

perekonomian keluarga serta pengaturan manajemen dan tata tertib administrasi, (2) pelatihan dan pendampingan pelaksanaan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), (3) Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan *Transect*, (4) penyuluhan tentang keorganisasian dan kewirausahaan pertanian/perkebunan, dan (5) penyiapan lokasi kebun bibit desa.

Kegiatan dan metode ini dilakukan setelah melihat permasalahan mitra seperti masih banyak anggota kelompok yang belum memiliki pengetahuan pentingnya berorganisasi untuk membantu perekonomian keluarga, manajemen dan administrasi organisasi yang masih belum tertib dan teratur, banyak yang tidak mengerti dan sama pemahamannya tentang budidaya pertanian, pengaturan waktu pembagian kerja yang belum teratur dalam mengurus organisasi dan usaha pertanian dengan kesibukan di urusan rumah tangga serta permasalahan kesulitan mencarikan lahan yang tepat bagi sebagian anggota untuk Kebun Bibit Desa.

Dalam penelitian ini, para peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani Lestari bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan manajemen dan keterampilan dari Kelompok Wanita Tani Lestari itu sendiri. Selain itu, pemberdayaan kelompok masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani Lestari juga bertujuan untuk memampukan mereka dalam membuat sebuah perencanaan partisipatif melalui metode *Transect* dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam

penyiapan sebuah kebun bibit desa baru bagi anggotanya (Mustanir, dkk, 2019: 227).

Kedua penelitian di atas menunjukkan kepada kita bahwa pemberdayaan perempuan yang terbentuk dalam Kelompok Wanita Tani merupakan hal yang urgen untuk dipraktikkan di desa. Pemberdayaan perempuan yang terbentuk dalam wadah Kelompok Wanita Tani merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas perempuan di desa. Sebab selama ini peran dan kedudukan perempuan masih belum menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan masih berada pada posisi yang dirugikan sementara laki-laki selalu berada pada posisi yang diuntungkan dalam skema pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan melalui wadah Kelompok Wanita Tani diharapkan bisa menjadi tempat untuk menyalurkan kemampuan dan pengetahuan khususnya di bidang pertanian terutama dalam menghadapi modernisasi pertanian.

Urgensi pemberdayaan masyarakat di desa secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (12) menegaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa” (Sutoro Eko, dkk, 2014: 4). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih aktif dan efisien. Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari kebutuhan dasar tersebut, (2) menunjukkan sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, dan (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Sari, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa (termasuk pemberdayaan perempuan) adalah peran serta pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai andil besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena bagaimanapun dalam suatu masyarakat desa pemerintah desa mempunyai *power* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Peran serta pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dilegitimasi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa salah satu kewenangan desa adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa. Pemberian kewenangan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk mencapai kemandirian desa. Kemandirian desa hanya bisa dicapai apabila desa diberi ruang untuk mendayagunakan segala sumber daya yang dimilikinya.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa dilatari oleh agumen bahwa pemerintah desalah yang paling memahami kepentingan warganya. Sebab pemerintah desa adalah pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Dengan perluasan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah desa, desa sesungguhnya dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya menuju kemandirian.

Desa Kraguman, di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi yang sangat baik di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduknya yaitu bertani. Potensi di sektor pertanian ini disadari oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan di Desa Kraguman membentuk Kelompok Wanita Tani.

Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman, menanam jahe dan sayur-sayuran. Di Desa Kraguman, penanggung jawab Kelompok Wanita Tani adalah Kepala Desa. Selain Kepala Desa, Kelompok Wanita Tani juga berada dalam naungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten. Bahkan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman lebih sering berkordinasi dengan Dinas Ketahan Pangan ketimbang dengan Pemerintah Desa Kraguman. Namun, sejauh ini Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman masih berkutat dengan persoalan klasik kelompok tani yaitu kekurangan dana. Berdasarkan hasil observasi, Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman belum mendapatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah Desa Kraguman. Kelompok Wanita Tani belum mendapatkan sokongan dana maupun bentuk

pemberdayaan yang lain dari Pemerintah Desa Kraguman. Selama ini, Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman hanya mendapat sokongan dana dari Pemerintah Kabupaten Klaten terutama melalui Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, penelitian ini secara tegas hendak melihat **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya pengetahuan tentang upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya bagi Kelompok Wanita Tani.

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa agar memberikan kuasa dan daya kepada Kelompok Wanita Tani untuk terlibat dalam pembangunan desa.

E. Kerangka Konseptual

1) Konsep Upaya

Secara etimologi, upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 995). Dari pengertian ini, maka upaya memiliki makna yang sangat luas, yakni memahami permasalahan yang ada sehingga masalah atau persoalan yang ada tersebut menjadi jelas dan dapat segera terpecahkan setelah berbagai masalah itu teridentifikasi akar masalahnya.

2) Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya (Widjaja, 2003: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Jadi, kesatuan antara Kepala Desa dan perangkat Desa itulah yang disebut dengan pemerintah desa. Dengan kalimat lain, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Meskipun desa bukan hanya sekadar pemerintahan desa, bukan hanya sekadar pemerintah desa serta bukan hanya sekadar kepala desa, tetapi kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, dkk, 2014: 158). Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pemimpin struktur pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dan masyarakat. Oleh karena itu,

penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat desa.

a) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah menggambarkan tentang pembagian kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab, baik kepada unit-unit kerja maupun perorangan dalam organisasi pemerintahan desa. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan tata kerja yang memberi kejelasan alur perintah, koordinasi, dan tanggung jawab baik secara hierariki-vertikal maupun relasi-horizontal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menentukan secara implisit tentang struktur organisasi tersebut yang tergambar dari ketentuan mengenai: (1) kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa; dan (2) susunan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Meskipun demikian UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak menentukan secara eksplisit mengenai struktur organisasi pemerintah desa, tetapi mendelegasikan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada peraturan pemerintah.

Berikutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengatur lebih detail mengenai

kepala desa dan perangkat desa. Untuk perangkat desa telah ditentukan mengenai jumlah unsur sekretariat, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis, yang menggambarkan mengenai unit-unit kerja dalam organisasi pemerintah desa. Tidak ada pendelegasian secara eksplisit untuk pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pemerintah desa kepada peraturan menteri. Akan tetapi, dalam pasal 62 dan 64 menentukan bahwa urusan dan pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur lebih detail mengenai Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah urusan atau unit kerja dalam sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, serta sebutan pejabat yang memimpin, yakni: (1) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 urusan yakni Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan; (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur pelaksana teknis masing-masing dipimpin oleh kepala dusun

- atau sebutan lain serta peraturan bupati; (3) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- b. Jumlah urusan dikatkan dengan jelas desa, yakni: (1) Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (2) Desa wakarsa dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi; (3) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi;
 - c. Kedudukan, tugas, dan fungsi mulai dari kepala desa, sekretariat desa, urusan-urusan, pelaksana kewilayahan, dan seksi-seksi;
 - d. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - e. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota (Triputro, 2019: 58-59).

b) Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan Pemerintah Desa adalah hak untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya

mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat) (Sutoro Eko, 2015: 101).

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan pemerintah desa yaitu Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang mencakup pengaturan (*public*

regulation), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Kewenangan pemerintah desa dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat setempat.

3) Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara sederhana pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Hal ini berarti bahwa terdapat tuntutan untuk kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, dan hak-hak reproduksi untuk dimasukkan di dalam setiap agenda pembicaraan publik. Jadi, pemberdayaan perempuan merupakan upaya memperbaiki posisi perempuan yang berlandaskan pada upaya-upaya penghapusan subordinasi perempuan.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, terdapat lima tingkat pemerataan, yaitu: *Pertama*, pemerataan tingkat kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya aset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya.

Kedua, pemerataan akses. Pemerataan akses yaitu meningkatkan kemampuan perempuan masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan laki-laki. Kalau

akses itu sudah diperoleh, maka langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan penyadaran.

Ketiga, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan kaum perempuan itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat berikutnya adalah peningkatan dan pemerataan partisipasi aktif.

Keempat, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang ditimpakan padanya.

Kelima, pemerataan penguasaan. Pemerataan penguasaan yaitu di mana partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999: 35-36).

4) Konsep Wanita Tani

Kegiatan pembangunan khususnya pada sektor pertanian menunjukkan peran serta semua pihak, terutama para petani dan keluarganya. Salah satu unsur tersebut adalah para istri petani maupun wanita yang mempunyai posisi sebagai kepala keluarga dan masyarakat pedesaan serta pengelola usaha tani atau pencari nafkah utama dalam keluarganya atau dapat disebut sebagai wanita tani. Manoppo berpendapat bahwa wanita tani adalah kaum wanita dalam keluarga petani dan masyarakat pertanian yang dibagikan ke dalam dua bagian, yakni wanita tani menurut statusnya dalam keluarga dan wanita tani menurut fungsinya dalam usaha tani. Apabila dilihat dari statusnya dalam keluarga, wanita tani terdiri dari:

- a. Kepala keluarga, yaitu wanita tani pada kondisi; wanita janda (ditinggal suami karena bercerai atau meninggal) atau wanita tidak menikah yang hidup mandiri, tidak menjadi tanggungan orang lain, bahkan sering juga mempunyai tanggungan;
- b. Istri petani, yaitu wanita yang menjadi istri petani, hidup satu rumah sebagai suami-istri yang sah;
- c. Wanita dewasa anggota keluarga, yaitu wanita yang berumur di atas 30 tahun atau yang sudah pernah menikah dan seorang petani (ibu, mertua, saudara, ipar, anak, kemenakan, dan lain-lain);

- d. Pemuda tani wanita, yaitu wanita tani yang berumur 16-30 tahun dan belum pernah menikah yang tinggal bersama satu keluarga petani (anak, kemenakan, dan lainnya); dan
- e. Taruna tani wanita, yaitu wanita remaja berumur di bawah 16 tahun dan belum pernah menikah yang tinggal dan menjadi tanggungan seorang petani.

Sementara itu, apabila dilihat dari fungsinya dalam usaha tani, wanita tani terdiri dari:

- a. Petani wanita, yaitu wanita pengusaha tani yang mengelola usaha tani secara mandiri. Petani wanita dapat berstatus sebagai:
 - 1) Kepala keluarga yang hidup atau mencukupi nafkah keluarganya dari usaha tani;
 - 2) Istri petani, seorang suami tidak berfungsi sebagai pencari nafkah utama atau bekerja di luar usaha tani keluarga; dan
 - 3) Wanita dewasa anggota keluarga atau pemuda tani wanita yang bertindak sebagai pengelola usaha tani secara mandiri (Manoppo, 2009).
- b. Mitra/pembantu usaha petani, yaitu wanita tani yang membantu pengusaha tani dalam keluarganya tanpa pemberian upah atau pembagian hasil secara ekonomi. Mitra petani tersebut berstatus sebagai:
 - 1) Istri petani;
 - 2) Wanita dewasa anggota keluarga; dan

3) Pemuda atau taruna wanita tani.

Lebih lanjut, Ramanti mendefinisikan wanita tani sebagai istri dari petani yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan usaha tani dan kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat didefinisikan sebagai kumpulan istri petani atau para wanita aktif yang memiliki aktivitas pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang memiliki keserasian untuk tujuan bersama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), para wanita yang tergabung di dalamnya akan memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk lebih produktif agar menjadi wanita wirausaha yang mandiri dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya (Ramanti, 2006).

Menurut Jokopusphito (2006), ciri-ciri kelompok wanita tani yaitu (1) seluruh anggotanya adalah wanita, (2) memiliki tujuan atau kepentingan yang sama, (3) adanya dorongan (motif) yang sama, (4) mempunyai reaksi-reaksi dan kecakapan yang berbeda, (5) mempunyai struktur organisasi yang jelas; (6) mempunyai norma-norma pedoman tingkah laku yang jelas, (7) adanya interaksi di antara sesama anggota, dan (8) adanya kegiatan kelompok yang nyata. Sementara itu, kelompok wanita tani juga memiliki peran terhadap para anggotanya sebagai: (1) kelas belajar, setiap anggota dapat berinteraksi satu sama lain guna

meningkatkan kemampuannya untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, (2) wahana kerjasama, tempat untuk memperkuat antaranggota dalam kelompok wanita tani lain dalam rangka lain dalam rangka pertukaran informasi, dan (3) unit penyedia sarana dan prasarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa panjang (Jokopusphito, 2006).

Kelompok Wanita Tani merupakan salah satu pihak yang dapat berperan pada pembangunan sektor pertanian. Keberadaan Kelompok Wanita Tani dapat memajukan sektor pertanian di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemberdayaan kepada Kelompok Wanita Tani merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan pemberdayaan pada Kelompok Wanita Tani dapat dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Menurut Edi Suharto (2005: 67-68), yang dimaksud dengan pendekatan pemberdayaan 5P adalah sebagai berikut:

a) Pemungkinan

Pemungkinan merupakan sebuah kosakata yang jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Kata pemungkinan merupakan terjemahan lain dari kata “*enabling*”. Menurut Edi Suharto, pemungkinan mempunyai kesamaan makna dengan istilah faktor pemungkin yaitu faktor yang mencakup berbagai keterampilan dan sumber daya, di mana keterampilan dan sumber daya merupakan poin penting yang

diperlukan untuk melakukan perubahan perilaku. Sumber day aitu meliputi fasilitas pelayanan publik. Faktor pemungkin ini juga mempunyai kaitan dengan keterjangkauan berbagai sumber daya, biaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu memberikan faktor pemungkin/pendukung kepada masyarakat sehingga mereka dapat merubah pola pikir, perilaku, serta kebiasaan

Pemungkinan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b) Penguatan

Penguatan dimaksudkan sebagai upaya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c) Perlindungan

Perlindungan dimaksudkan sebagai upaya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d) Penyokongan

Penyokongan dilakukan dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e) Pemeliharaan

Pemeliharaan dimaksudkan untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah kerja pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan, pendidikan, maupun pemberian penguatan pengetahuan dan kemampuan pada masyarakat agar mandiri. Artinya, masyarakat memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan agar lebih terarah serta berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Upaya pemerintah desa dalam menciptakan pemungkinan bagi Kelompok Wanita Tani;
- 2) Upaya pemerintah desa dalam memberikan penguatan bagi Kelompok Wanita Tani;
- 3) Upaya pemerintah desa dalam memberikan perlindungan bagi Kelompok Wanita Tani;
- 4) Upaya pemerintah desa dalam memberikan penyokongan bagi Kelompok Wanita Tani; dan
- 5) Upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pemeliharaan bagi Kelompok Wanita Tani.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural) dan peneliti menjadi instrumen kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada

makna dari yang diteliti daripada mengeneralisasikan obyek penelitian (Sugiyono, 2007).

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002: 5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemanfaatan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis data kualitatif menghasilkan deskripsi yang berbobot yang maknanya mendalam (Tim Penyusun, 2011: 25).

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Jadi, unit analisis dalam penelitian ini mencakup individu yang direpresentasikan oleh beberapa masyarakat desa, kelompok yang direpresentasikan oleh Kelompok Wanita Tani, organisasi yang direpresentasikan oleh Kepala Desa, dan wilayah yaitu Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*) (Sugiyono, 2015: 229).

Fokus penelitian ini adalah Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Unsur

pemerintah desa yang bertugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa adalah kepala desa. Dengan demikian pelaku objek penelitiannya adalah Kepala Desa Kraguman serta segala usahanya dalam memberikan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan bagi Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Pengurus atau Pengelola Kelompok Wanita Tani, anggota Kelompok Wanita Tani, dan tokoh masyarakat di Desa Kraguman. Subyek penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan obyek penelitian dan diharapkan mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Subyek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai informan). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman. Adapun iniforman dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa Kraguman;
- 2) Pengurus atau pengelola Kelompok Wanita Tani (3 orang);
- 3) Anggota Kelompok Wanita Tani (4 orang); dan
- 4) Tokoh masyarakat (2 orang).

Tabel 1.1

Profil Subyek Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Bapak Sunaryo	61 tahun	Kepala Desa
2	Rini Sumanti	50 tahun	Ketua KWT Bina Melati
3	Ibu Titik Sumaryati	62 tahun	Bendahara KWT Bina Melati
4	Ibu Swinanti Rining Pamungkas	48 tahun	Unit Sarana dan Prasarana Produksi
5	Ibu Beta Siwi Wisudaningyas	58 tahun	Anggota KWT Bina Melati
6	Ibu Sri Rahayu	48 tahun	Anggota KWT Bina Melati
7	Ibu Sujiem	58 tahun	Anggota KWT Bina Melati
8	Ibu Istinah	58 tahun	Anggota KWT Bina Melati
9	Bapak Marsudi	47 tahun	Tokoh Masyarakat Desa Kraguman
10	Ibu Linda	36 tahun	Tokoh Masyarakat Desa Kraguman

3) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena di lokasi ini pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik

pengumpulan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat dan sesuai dengan masalah yang akan diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek dan subjek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indra. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikuntoro, 1998: 146).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan lima (5) kali observasi. Dari observasi tersebut, peneliti memperoleh pengetahuan tentang program pembangunan, potensi lokal baik berupa potensi fisik maupun non-fisik, serta masalah dan kendala yang ada di Desa Kraguman. Proses observasi ini dilakukan dengan mencermati keberadaan objek dan subjek penelitian dengan memanfaatkan alat indra seperti indra penglihatan dan indra pendengaran. Observasi ini sedikit mengalami kendala karena letak lokasi yang akan diamati cukup jauh. Selain itu, kehadiran pandemi Covid-19 membuat peneliti tidak dapat dengan leluasa untuk mengamati objek dan subjek penelitian.

2) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengkonstruksikan kegiatan dan kejadian serta untuk memverifikasi dan memperluas data/informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan *interview guide*, di mana petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan yang direncanakan dapat tercapai (Iqbal, 2008: xxxviii).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode wawancara yaitu wawancara langsung di lokasi penelitian dan wawancara tidak langsung (*online*). Kedua metode ini dipakai karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terus mengancam kesehatan umat manusia. Penggunaan kedua metode ini tentu saja mempengaruhi penelitian ini. Dalam proses wawancara, peneliti setidaknya mendapati dua kendala yaitu kesulitan untuk menyesuaikan waktu dengan informan dan penggunaan metode wawancara *online* membuat peneliti tidak dapat leluasa menggali informasi dari informan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer

(observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Dokumentasi dapat berupa profil daerah, artikel, maupun berita yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diperoleh dari media massa dan lain-lain. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendokumentasikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara langsung dan wawancara online dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Sementara itu, data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa dokumen profil desa, profil Kelompok Wanita Tani, dan berita yang ditulis oleh jurnalis dalam majalah dan surat kabar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada analisis data lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tentang interaktif model yang menghasilkan analisis data ke dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992: 16-20).

4) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkann untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti

persistent observation (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan (obesrvasi) dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

BAB II
PROFIL DESA KRAGUMAN, KECAMATAN JOGONALAN,
KABUPATEN KLATEN

A. Sejarah Desa Kraguman

Desa Kraguman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, Desa Kraguman merupakan tempat untuk berembuk atau bermusyawarah. Nama Kraguman diambil dari bahasa Sanskerta yang mempunyai kata dasar yaitu “ragum”.

Desa Kraguman merupakan hasil penggabungan atau blengketan antara Desa Noyopaten dan Desa Candran. Penggabungan tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1926. Penggabungan tersebut menandai berakhirnya Pemerintahan Desa Noyopaten. Selain itu, penggabungan tersebut ditandai dengan dibangunnya gapura di rumah tinggal Kepala Desa Noyopaten di Noyopaten.

B. Kondisi Geografis Desa Kraguman

Desa Kraguman merupakan salah satu dari 18 Desa di wilayah Kecamatan Jogonalan. Jarak orbitasi dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 0,2 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 10 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten 6 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 30 menit.

Dalam suatu penelitian, pengetahuan akan letak dan batas wilayah sangat penting bagi peneliti. Pengetahuan akan letak dan batas wilayah akan memudahkan peneliti dalam menganalisis suatu objek. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Adapun letak dan batas wilayah Desa Kraguman disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Batas Wilayah Desa

No	Wilayah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Desa Granting
2	Sebelah Selatan	Desa Bakung
3	Sebelah Barat	Desa Prawatan
4	Sebelah Timur	Desa Plawikan

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa letak Desa Kraguman dapat terbilang sangat strategis karena berada di tengah Kecamatan Jogonalan. Letaknya yang cukup strategis memudahkan Desa Kraguman dalam menjalankan segala urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan desa. Dengan keadaan seperti ini, Desa Kraguman dapat melakukan skema kerjasama antardesa untuk mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan, misalnya dengan membangun BUMDes bersama desa-desa tetangga.

Secara keseluruhan luas wilayah Desa Kraguman yaitu 147.948 Ha. Desa Kraguman terbagi menjadi 17 Padukuhan, 24 Rukun Tetangga (RT), dan 11 Rukun Warga (RW). Wilayah Desa Kraguman terdiri dari jalan, sawah dan ladang, bangunan umum, empang/kolam, pemukiman/perumahan, perkuburan,

dan lain-lain. Tabel berikut akan menunjukkan penggunaan lahan di Desa Kraguman.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Desa

No	Wilayah	Ukuran	Persentase (%)
1	Jalan	5.4450 Ha	3,7
2	Sawah dan Ladang	85.0082 Ha	57,5
3	Bangunan Umum	21.7245 Ha	14,7
4	Empang/Kolam	0.1690 Ha	0,1
5	Pemukiman/Perumahan	31.9153 Ha	21,6
6	Perkuburan	1.7210 Ha	1,1
7	Lahan Lainnya	1.9650 Ha	1,3
Total		147.948 Ha	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa wilayah Desa Kraguman didominasi oleh sawah dan ladang yaitu sebesar 57,5 %. Hal ini berarti wilayah Desa Kraguman didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Dengan begitu, pertanian dan perkebunan merupakan potensi utama yang dapat dikembangkan di Desa Kraguman. Selain itu, penduduk Desa Kraguman juga menggunakan lahan untuk mengembangkan usaha peternakan. Dengan keadaan seperti ini, maka para petani dan peternak mesti diletakkan sebagai aktor atau subjek utama dalam pembangunan di Desa Kraguman. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap para petani dan peternak mesti menjadi basis utama kebijakan Pemerintah Desa Kraguman, sehingga potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal.

Data di atas juga menunjukkan bahwa di Desa Kraguman juga terdapat lahan yang belum digunakan (1,3%) untuk keperluan sosial maupun ekonomi. Salah satu lahan yang belum digunakan untuk keperluan sosial dan ekonomi

adalah tanah kas desa. Pada masa sebelumnya, lahan di sekitar Kantor atau Balai Desa Kraguman dibiarkan kosong dan tidak dikelola sama sekali. Tetapi, sejak terbentuknya Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman, Pemerintah Desa Kraguman memberikan akses kepada Kelompok Wanita Tani untuk mengelola lahan kosong tersebut. Sejauh ini, Kelompok Wanita Tani Bina Melati memanfaatkan tanah kas desa seluas 300 meter. Kelompok Wanita Tani memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk ditanami berbagai macam tanaman seperti kacang, cabe, tomat, dan terong. Sejauh ini produk yang telah dijual yaitu cabe, jahe, kangkong, dan terong. Hasil dari penjualan produk tersebut masih tergolong kecil yaitu berkisar Rp. 70.000 sampai Rp. 100.000 saja. Berikut adalah tabel jenis dan jumlah produksi pertanian Kelompok Wanita Tani Bina Melati dalam satu tahun.

Tabel 2.3

Produksi Pertanian KWT Bina Melati

No	Jenis Produk	Jumlah Produk (Kg)
1	Cabe	10
2	Jahe	10
3	Kangkong	10
4	Terong	10
Total		40

Sumber: Profil KWT Bina Melati Tahun 2020

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Kelompok Wanita Tani Bina Melati menghasilkan empat jenis produk pertanian yaitu cabe, jahe, kangkung, dan terong. Sampai saat ini, jumlah produksi pertanian yang dihasilkan oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati

dalam satu tahun masih berkisar 10 Kg. Meskipun demikian, dalam tahun yang akan datang, jenis dan jumlah produksi pertanian Kelompok Wanita Tani Bina Melati diyakini akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari terobosan yang dilakukan Kelompok Wanita Tani Bina Melati yang mulai menambahkan jenis produk baru di kebunnya yaitu kacang dan tomat.

C. Kondisi Demografis Desa Kraguman

Bagian ini mendeskripsikan kondisi demografis atau kependudukan Desa Kraguman, baik berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Merujuk pada dokumen profil Desa Kraguman tahun 2020, kondisi demografis Desa Kraguman adalah sebagai berikut:

a. Kependudukan

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.914 jiwa	49,7
2	Perempuan	1.936 jiwa	50,3
Total		3.850 jiwa	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Dari tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kraguman berjumlah 3.850 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1.914 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan berjumlah 1.936 jiwa (50,3%). Dengan begitu, dapat diketahui pula bahwa populasi penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Kraguman hampir berimbang. Sementara itu, Kepala Keluarga di Desa Kraguman berjumlah 1.318.

Penduduk Desa Kraguman mempunyai berbagai macam mata pencaharian. Tabel berikut akan menunjukkan variasi mata pencaharian penduduk Desa Kraguman.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Presentase (%)
1	Akuntansi	1	00,4
2	Bidan	2	00,8
3	Buru Harian Lepas	1248	51,90
4	Buruh Peternakan	1	00,4
5	Buruh Tani/Perkebunan	13	0,54
6	Dosen	3	00,12
7	Guru	49	2,03
8	Industri	2	00,8
9	Karyawan BUMD	3	00,12
10	Karyawan BUMN	5	00,20
11	Karyawan Swasta	325	13,51
12	Kepala Desa	1	00,8
13	Kepolisian RI	6	00,24
14	Konstruksi	3	0,12
15	Mengurus Rumah Tangga	248	10,31
16	Pedagang	48	1,99
17	PNS	59	2,45
18	Pelaut	2	00,8
19	Pensiun	50	2,07
20	Perangkat Desa	7	00,29
21	Perawat	2	00,8
22	Perdagangan	73	3,03
23	Petani/pekebun	19	0,79
24	Sopir	4	00,16
25	TNI	9	00,37
26	Transportasi	3	00,12
27	Tukang Batu	2	00,8
28	Tukang Jahit	2	00,8
29	Wiraswasta	255	10,60
Total		2.405	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kraguman sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Desa Kraguman merupakan salah satu desa sub-urban yang berada di pinggiran kota Klaten, ibu kota Kabupaten Klaten.

Mayoritas penduduk Desa Kraguman bekerja sebagai buruh harian lepas (51,90%). Buruh harian lepas ini biasanya bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani atau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan hanya berjumlah 13 orang (0,54%). Hal ini berbanding terbalik dengan luas wilayah Desa Kraguman yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Ini berarti bahwa penduduk Desa Kraguman sudah mulai meninggalkan mata pencaharian sebagai petani. Dengan keadaan seperti ini, maka potensi pertanian dan perkebunan di Desa Kraguman belum dikembangkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Hal lain yang bisa dilihat dari tabel di atas adalah bahwa sebagian penduduk di Desa Kraguman bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dengan kenyataan seperti ini, maka pemberdayaan terhadap para petani dan kaum perempuan di Desa Kraguman merupakan hal yang mendesak. Pemberdayaan untuk para petani dan kaum perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani dan kaum perempuan dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

Tabel 2.6

Mata Pencaharian Menurut Sektor

No	Sektor Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang)	Jumlah Buruh/Karyawan/Pengumpul (Orang)
1	Pertanian	155	452
2	Perkebunan	36	-
3	Peternakan	423	14
4	Perikanan	2	-
5	Perdagangan	22	-

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa meskipun mata pencaharian penduduk Desa Kraguman bervariasi, tetapi sebagian penduduk tetap mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan sebagai mata pencaharian. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 423 orang penduduk Desa Kraguman yang memiliki usaha pada bidang peternakan. Penduduk Desa Kraguman biasanya beternak kambing, ayam, lele, dan burung. Pemilik usaha peternakan ini mempekerjakan 14 orang buruh untuk mengembangkan usaha peternakannya.

Dari data di atas juga, kita dapat mengetahui bahwa di Desa Kraguman, terdapat 155 orang yang mempunyai usaha pada bidang pertanian. Penduduk Desa Kraguman biasanya memanfaatkan lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman seperti padi, pisang, jagung, dan papaya. Pemilik usaha pertanian ini mempekerjakan 455 orang buruh untuk mengelola lahan pertaniannya.

Sementara itu, di antara penduduk Desa Kraguman, terdapat 34 orang yang memiliki usaha pada bidang perkebunan, terdapat 2 orang yang

memiliki usaha pada bidang perikanan, dan terdapat 22 orang yang memiliki usaha pada bidang perdagangan. Pemilik usaha pada ketiga bidang ini tidak mempekerjakan buruh atau karyawan dalam mengembangkan usahanya.

b. Pendidikan

Tabel 2.7

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD/MI	656	24,57
2	SLTP/MTs	598	22,40
3	SLTA/MA	1135	42,50
4	Akademi (D1-D3)	92	3,40
5	Sarjana (S1-S3)	189	7,10
Total		2.669	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kraguman boleh dibilang cukup baik. Mayoritas penduduk Desa Kraguman didominasi oleh penduduk yang pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Kraguman cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk menggerakkan perubahan di Desa Kraguman. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik maka cita-cita menjadikan Desa Kraguman sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai

ini, maka terobosan-terobosan dan ide-ide konstruktif untuk membangun desa dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Sumber daya manusia di Desa Kraguman yang cukup memadai ini ditopang oleh keberadaan lembaga pendidikan. Tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Desa Kraguman.

Tabel 2.8

Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit	Lokasi
1	Gedung TK/PAUD	2 unit	Di Dusun I dan Dusun II
2	SD/MI	2 unit	Di Dukuh Kraguman dan di Dukuh Padokan
3	SLTP/MTs	1 unit	Di Dukuh Kraguman
4	SLTA/MA	-	
5	Lain-lain	1 unit	Di Dukuh Kraguman

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di Desa Kraguman terdapat lembaga pendidikan berupa gedung TK/PAUD, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, dan fasilitas lain yang bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak. Lembaga pendidikan merupakan institusi atau tempat di mana seseorang melakukan aktivitas belajar-mengajar. Lembaga pendidikan dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang terutama terkait kualitas intelektual dan emosional.

D. Kondisi Pemerintah Desa Kraguman

Pemerintah Desa Kraguman terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, serta Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Desa Kraguman.

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang

pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

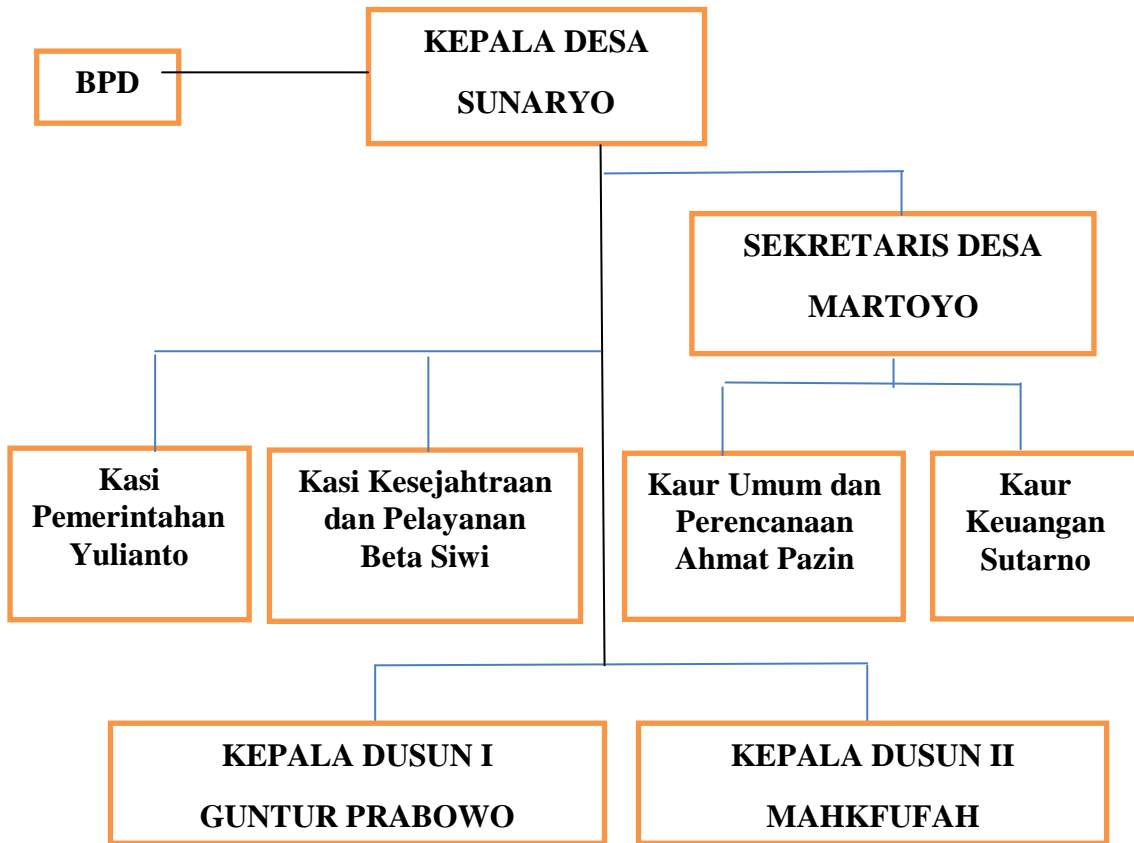
5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Sugiman, 2017: 87-88).

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kraguman



Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2020

E. Profil Kelompok Wanita Tani Desa Kraguman

Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman terbentuk pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Mei 2019. Kelompok Wanita Tani ini diberi nama Kelompok Wanita Tani Bina Melati. Kelompok Wanita Tani Bina Melati ini dibentuk dengan berfokus pada usaha membentuk dan mendukung kelompok tani perempuan. Masing-masing anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati bekerja bersama-sama untuk menanam aneka sayuran di kebun bersama dan di

pekarangan rumah. Hasilnya biasa dijual ke pedagang atau dimakan sendiri; sedangkan pendapatan dari penjualan dikelola oleh kelompok. Ada bagian pendapatan yang dibagikan di antara anggota kelompok dan ada yang ditanamkan kembali ke dalam kegiatan kelompok.

1. Visi dan Misi Kelompok Wanita Tani Bina Melati

Dalam membentuk kelompok, para pengurus Kelompok Wanita Tani Bina Melati membuat visi dan misi kelompok. Hal ini dilakukan agar Kelompok Wanita Tani Bina Melati mempunyai arah yang jelas dan teratur dalam melakukan kegiatan.

2. Visi Kelompok Wanita Tani Bina Melati

“Mewujudkan kesejahteraan anggota, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan keluarga, dan menjadikan ibu rumah tangga anggota Kelompok Wanita Tani menjadi pribadi yang mandiri”.

3. Misi Kelompok Wanita Tani Bina Melati

“Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan berdaya saing”.

4. Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Bina Melati

Susunan kepengurusan Kelompok Wanita Tani Bina Melati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Susunan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Bina Melati

No	Nama	Jabatan
1	Siti Ajar Ismiyati, S.Pd, MA	Penasehat
2	Rini Sumanti	Ketua
3	Suwanti	Sekretaris I
4	Eka Wahyu Suprihatiningsih, S.Pd	Sekretaris II
5	Siti Chotimah	Bendahara I
6	Titik Sumaryati	Bendahara II
7	Marjiyem	Unit Usaha dan Budidaya
8	Sarmini	Unit Usaha dan Budidaya
9	Swinanti Rining Pamungkas	Unit Sarana dan Prasarana Produksi
10	Ari	Unit Sarana dan Prasarana Produksi
11	Sarwanti	Unit Pemasaran
12	Sri Wijastuti	Unit Pemasaran

Sumber: Profil Kelompok Wanita Tani Bina Melati Tahun 2020

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pengurus Kelompok Wanita Tani Bina Melati adalah sebagai berikut:

a) Penasehat

Penasehat memiliki tugas dan wewenang untuk menasehati, melindungi, dan membina Kelompok Wanita Tani Bina Melati.

b) Ketua

Ketua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengkoordinir jalannya suatu pekerjaan semua pemegang jabatan atau anggota;
2. Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang jabatan atau anggota;
3. Membagi tugas kepada koordinator atau bagian; dan
4. Memimpin dan mengambil kebijaksanaan dalam setiap pertemuan atau mengadakan rapat.

c) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengerjakan secara administratif hal-hal yang harus dicatat atau diolah secara administratif;
2. Melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh ketua jika ada musyawarah;
3. Membentuk ketua dan wakil ketua dalam mengendalikan kegiatan kelompok;
4. Bersama bendahara membuat rancangan anggaran belanja dalam kelompok; dan
5. Membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan kegiatan.

d) Bendahara

Bendahara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

1. Menampung, menyimpan, dan membukukan uang yang ada;
2. Bertanggung jawab terhadap keuangan yang ada;
3. Membuat laporan keuangan baik yang masuk atau keluar; dan
4. Memegang seluruh bukti pengeluaran.

e) Unit Sarana dan Prasarana Produksi

Unit sarana dan prasarana produksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan jumlah produk yang akan diproduksi setiap bulannya;

2. Mengkoordinasikan jenis produk yang akan diproduksi pada setiap anggota kelompok; dan
3. Menghitung kebutuhan bahan dan alat yang digunakan dalam mengolah produk yang akan dipasarkan.

f) Unit Pemasaran

Unit pemasaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk dengan baik;
2. Mendistribusikan produk; dan
3. Mempromosikan produk dengan efektif.

Sementara itu, hingga saat ini Kelompok Wanita Tani Bina Melati telah mempunyai sepuluh (10) anggota. Kesepuluh anggota itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati

No	Nama
1	Sri Rahayu
2	Istinah
3	Yeni
4	Sinem
5	Beta Siwi Wisudaningyas
6	Mahkfufah
7	Martni
8	Fitri
9	Ibnu
10	Kulni

Sumber: Profil Kelompok Wanita Tani Bina Melati Tahun 2020

Anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membantu semua pemegang jabatan;

2. Membantu mengatasi kesulitan yang dijumpai oleh pemegang jabatan;
dan
3. Melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin sesuai peraturan yang disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abercrombie, Nicholas Stephen Hill, Bryan S. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikuntoro, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tim Penyusun. 2011. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Prodi PGMI.
- Tripuro, Widodo. 2019. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Alam, Khaerati S, Lukman Hakim, Andi R. Razak. 2019. *Pengaruh Partisipasi Kelompok Wanita Tani Terhadap Peningkatan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Appanang, Kabupaten Soppeng*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, Jurnal Administrasi Publik Volume 5, Nomor 3.
- Ardiani, Farinda Dita. 2020. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani “Asri” di Dusun Bendung, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta: STPMD “APMD”.
- Elizabeth, Rosganda. 2008. Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Pedesaan. *Iptek Tanaman Pangan* Volume 2, Nomor 1.
- Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai 2008 di Kabupaten Kudus. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jokopusphito, S. 2006. Hubungan Antara Perilaku Komunikasi dengan Tingkat Adopsi Teknologi Diversifikasi Pangan dan Gizi pada Kelompok Wanita Tani (Studi Kasus pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Manoppo, C. N. 2009. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Wanita Tani dalam Usaha Tani Kakao (Kasus di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mayanfa’uni, Arini. 2016. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka di RW 02, Kelurahan Petukangan Selatan. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Mustanir, Ahmad, Hariyanti Hamid, dan Rifni Nikmat Syarifuddin. 2019. *Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa dalam Perencanaan Metode Partisipatif*. Sidenreng Rappang: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Jurnal Moderat Volume 5 Nomor 3.
- Novian, Budhy. 2010. Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
- Pratama, Crivis. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis. Surabaya: Universitas Airlangga, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1.

- Purnasari, L. 2014. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Bagi Aktualisasi Perempuan di Desa Kemanukan Bagelan Purworejo Jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ramanti, R. P. 2006. Perilaku Wirausaha Wanita Peternak dalam Mencari dan Menerapkan Informasi Usaha Ternak Ayam Buras (Kasus Kelompok Tani-Ternak “Tanjung”, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saptandari, Pinky. 1999. *Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun XII, Nomor 2.
- Sari, Rosnida. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata*. Aceh: Universitas Islam Negeri, Jurnal Al-Bayan Volume 22, Nomor 34.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 7, Nomor 1.
- Syarif, Asriyanti. 2018. Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) Pada Usaha Tani Sayuran di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, Ziraah, Volume 43, Nomor 1.
- Wiranti, Debi. 2016. Hubungan Antara Tingkat Partisipasi dengan Produktivitas Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Produksi Susu Karamel di Desa Tajur Halang Cijeruk Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Internet

<https://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-unit-analisis-dalam-penelitian.html>, diakses pada 01/07/2021 pukul 15: 33 WIB.

Dokumen

Profil Desa Kraguman Tahun 2020.

Profil Kelompok Wanita Tani Bina Melati Tahun 2020.

Wawancara

Wawancara peneliti dengan Ketua Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Rini Sumanti pada 18/07/2021.

Wawancara peneliti dengan anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Beta Siwi Wisudaningyas pada 18/07/2021.

Wawancara peneliti dengan anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Istimah pada 18/06/2021.

Wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kraguman, Bapak Sunaryo pada 18/07/2021.

Wawancara peneliti dengan anggota Kelompok Wanita Tani, Sri Rahayu pada 18/07/2021.

Wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Kraguman, Bapak Marsudi pada 18/07/2021.

Wawancara dengan pengurus Unit Sarana dan Prasarana Produksi Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Swinanti Rining Pamungkas pada 18/06/2021.

Wawancara dengan anggota Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Sujiem pada 18/06/2021.

Wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Kraguman, Ibu Linda pada 18/07/2021.

Wawancara peneliti dengan Bendahara Kelompok Wanita Tani Bina Melati, Ibu Titik Sumaryanti pada 18/07/2021.